



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 30 Maret 2026

Inspaktur,

Ferino Romko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang merupakan laporan kinerja pada tahun kedua pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-20256 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

LKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa "Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai evaluasi terhadap program kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun dimaksud. Selain itu, Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada public secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal keberhasilan LKjIP ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan Sasaran Stratetis Kota Padang Panjang.

Melalui laporan ini, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berharap dapat memberikan gambaran objektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efesien, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam urusan perhubungan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini semoga dapat menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dinas lebih baik pada masa mendatang.

Padang Panjang, Januari 2026
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP.19850609 200412 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS.....	5
1.6 TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT ..	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	41
BAB IV PENUTUP	44
4.1 KESIMPULAN.....	44
4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	45
4.3 SARAN/ REKOMENDASI.....	45
LAMPIRAN	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data ASN Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat.....	4
Tabel 1. 2	Data ASN Menurut Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1. 3	Data Pegawai Dengan Kompetensi Teknis dan Pendidikan Transportasi.....	4
Tabel 1. 4	Data PPPK Paruh Waktu pada Dinas Perhubungan.....	4
Tabel 1. 5	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	7
Tabel 1. 6	Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024.....	8
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029..	10
Tabel 2. 2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dan Tahun 2025-2029.....	10
Tabel 2. 3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 dengan.....	11
Tabel 2. 4	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dan RPJMD, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Renstra.....	12
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.....	14
Tabel 2. 6	Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 3. 1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas.....	19
Tabel 3. 2	Data Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	20
Tabel 3. 3	Rincian Data Kebutuhan Trayek.....	21
Tabel 3. 4	Rincian Data Trayek yang Dilayani.....	21
Tabel 3. 5	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kinerja Lalu Lintas.....	0
Tabel 3. 6	Data Dukung Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2025....	23
Tabel 3. 7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
Tabel 3. 8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2024-2026.....	25
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2024-2026.....	25
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Propinsi	26
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Propinsi	26
Tabel 3. 13	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan.....	32
Tabel 3. 14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Hasil Kegiatan.....	33
Tabel 3. 15	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 16	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 17	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 18	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	38



Tabel 3. 19	.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	38
Tabel 3. 20	.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	39
Tabel 3. 21	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	39
Tabel 3. 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	40
Tabel 3. 23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	40
Tabel 3. 24	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2025	41
Tabel 3. 25	Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2025	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	3
-------------	---	---



IKHTISAR

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2024 sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah berdasarkan Renstra 2024-2026 dan diubah menjadi Renstra 2025-2029 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah menetapkan tujuan yakni “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan” dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan memiliki sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat, dengan indikator kinerja yaitu;
 - a. Rasio Konektivitas Kota
 - b. Kinerja Lalu Lintas Kota
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Dinas Perhubungan.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dari rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan baik dari target yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja tentu tidak lepas dari upaya mengatasi kendala dan permasalahan sehingga Dinas Perhubungan melakukan langkah-langkah antisipatif menanggulangi kendala diantaranya :



1. Melakukan survey dan pendataan jumlah angkutan kota yang beroperasi;
2. Melakukan survey dan pendataan jumlah penumpang menggunakan angkutan kota
3. Peningkatan layanan trayek yang menjangkau kebutuhan masyarakat akan moda transportasi.
4. Melakukan survey dan penghitungan kinerja lalu lintas pada ruas jalan utama di Kota Padang Panjang (*survey traffic counting*).
5. Optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara internal maupun eksternal.

Dari segi pendanaan dalam tahun 2025 nilai capaian kinerja anggaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan total pagu sebesar Rp. 11.737.042.929,00 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 10.027.094.193,00 (93,95%), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Penunjang Urusan dengan anggaran sebesar Rp. 8.322.289.073,00 terealisasi sebesar Rp. 8.094.937.010,00 (97,27%).
- ✓ Belanja Urusan Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.3.414.753.856,00 terealisasi sebesar Rp. 2.932.157.183,00 (85,87%).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu prasyarat Pemerintahan yang baik dan terpercaya dibutuhkan adanya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan disetiap unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Secara umum Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menyajikan gambaran secara transparan atau capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2025. Laporan Kinerja ini terselesaikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan tahun 2025. Sehingga dalam penyusunannya disampaikan dengan data dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan sector perhubungan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan Kota Padang Panjang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

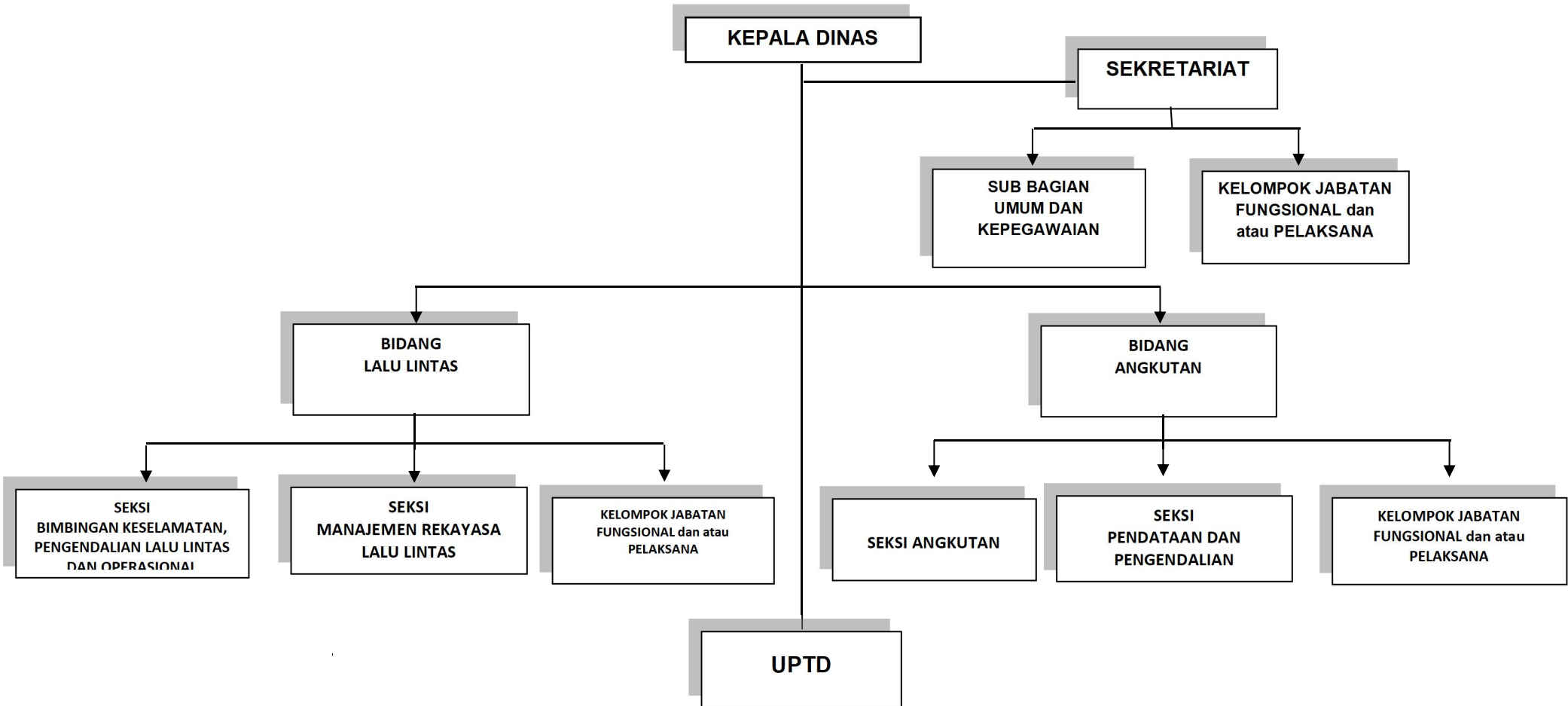
1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Bidang Lalu Lintas, membawahi ;
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional,
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas,
3. Bidang Angkutan, Perpajakan dan Akreditasi, membawahi ;
 - a. Seksi Angkutan,
 - b. Seksi Pendataan dan Pengendalian,
4. Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. UPTD.



Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan akhir tahun 2025 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berjumlah 102 Terdiri dari 60 orang Pegawai Negeri Sipil dan 42 orang PPPK Paruh Waktu.

Adapun perincian PNS Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang kepegawaian, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Data ASN Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	10	4	1	4	8	1	14
Bid. Lalu Lintas	24	4	-	13	15	-	28
Bid. Angkutan	9	3	-	3	8	1	12
UPTD PKB	4	1	-	1	4	-	5
Jumlah	48	12	1	21	35	3	60

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tabel 1. 2 Data ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 -D3	S1	S2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	1	4	3	6	-	14
Bid. Lalu Lintas	6	9	6	7	-	28
Bid. Angkutan	-	3	2	6	1	12
UPTD PKB	-	1	2	2	-	5
Jumlah	7	17	13	21	2	60

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tabel 1. 3 Data Pegawai Dengan Kompetensi Teknis dan Pendidikan Transportasi

Kualifikasi	Kondisi Riil	Pria	Wanita
Penguji	3	3	-
PPNS	2	2	-
D.IV Transportasi Darat	7	4	3
D.III MTJ	6	4	2
D.III Perkeretaapian	2	1	1
D.II PKB	1	1	-
Jumlah	21	15	6

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tabel 1. 4 Data PPPK Paruh Waktu pada Dinas Perhubungan

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 -D3	S1	S2	Jumlah
Kepala						
Sekretariat	2	7		3		12
Bid. Lalu Lintas	1	6	4	2		13
Bid. Angkutan	6	8				14
UPTD PKB		1		2		3
Jumlah	9	22	4	7		42

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025



1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Aspek strategis Dinas Perhubungan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths)

- Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
 - Dinas Perhubungan memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana, UPTD.
 - Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2024.
- Realisasi anggaran tinggi dan sesuai dengan prinsip value for money
 - Realisasi anggaran mencapai 93,95%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
 - Dinas Perhubungan telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran.
- Indek Kualitas Layanan Infrastruktur bernilai Sangat Baik dengan Mutu A
 - Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah mencapai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan nilai 96,71 memberikan pelayanan publik dalam urusan perhubungan yang memenuhi unsur layanan terkait perlengkapan jalan, fasilitas keselamatan, ketersediaan lahan parkir, sumber daya manusia.

2. Kelemahan (Weakness)

- Minimnya SDM berkompetensi dan Sertifikasi
Dari 60 ASN, hanya 1 pegawai berkompetensi PPNS, 3 pegawai berkompetensi Penguji, 2 pegawai berkompetensi Penilai Andalalin, 8 pegawai bersertifikasi bidang perhubungan, sehingga belum memenuhi pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padang Panjang.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
 - Sarana mobilitas layanan perhubungan masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dengan penambahkan kendaraan operasional roda empat dan roda dua.
- Pelatihan dan pengembangan SDM belum maksimal
 - Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan penguji ataupun sertifikasi dibidang perhubungan, menyebabkan keterbatasan peningkatan kompetensi.



3. Peluang (Opportunities)

- Optimalisasi pemanfaatan terminal Tipe C yang telah ada dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung.
- Penataan jaringan trayek angkutan kota, sinkronisasi terkait penatausahaan angkutan umum antar pengusaha dengan pemerintah daerah.
- Optimalisasi pangkalan truk dan rest area angkutan barang sesuai dengan DED Rest Area.
- Penetapan rute angkutan barang dan bongkar muat dan lokasi bongkar muat pada kawasan bisnis.
- Melakukan analisa kebutuhan dan penambahan kantong parkir pada lokasi tertentu, taman parkir serta gedung parkir.
- Perlunya analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas.
- Menjaga kualitas perlengkapan lalu lintas melalui kegiatan pengadaan dan rehabilitasi.
- Perlunya penengakan hukum bersama stakeholder terkait.
- Pengembangan wawasan dan kompetensi SDM baik pengujian, lalu lintas dan angkutan melalui pendidikan dan latihan yang berkompotensi.

4. Ancaman (Threats)

- Pelayanan angkutan umum seperti ketersediaan infrastruktur terminal Tipe C, peningkatan animo masyarakat menggunakan angkutan umum, pengembangan jaringan trayek angkutan, peningkatan sarana dan kapasitas layanan angkutan umum.
- Pelayanan angkutan barang seperti analisa kebutuhan infrastruktur pangkalan dan rest area angkutan barang serta manajemen distribusi dan bongkar muat.
- Pelayanan parkir serta fasilitas perpakiran.
- Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- Pelayanan serta perlengkapan lalu lintas dalam rangka keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Beberapa isu strategis sektor perhubungan berdasarkan factor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ada. Isu ini adalah akumulasi permasalahan pelayanan yang sering dihadapi dan peluang-peluang yang ada, maka beberapa isu strategis pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :



1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massal.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas.
5. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor.
6. Meningkatnya pertumbuhan angkutan online.
7. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area).
8. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas
9. Belum memadai sarana dan prasarana perpikiran.

1.6 TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT

Hasil evaluasi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 memperoleh nilai 70,70 predikat B. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Internal	25	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2024 senilai 70,70 jika dibandingkan dengan nilai evaluasi tahun 2023 senilai 71,76 mengalami penurunan sebesar 1,47%, hal ini disebabkan karena masih terdapat kekurangan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal.

Adapun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Padang Panjang sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
A. Perencanaan Kinerja									
1	Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran	Telah diperbaiki penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional	1 Dokumen	B05	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah diperbaiki	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7nk2YwTEI3BSFyJha7jDDycRsOXzdw/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
2	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi dan diuraikan dalam dokumen laporan pengukuran kinerja eselon II, III, IV	Telah dilakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi	1 Dokumen	B01, B04, B07, B10, B11	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah tersusun	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xMpg-hXZ5YQpFIFYBJL00HIXSiug/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
B. Pengukuran Kinerja									
1	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan Mutasi rotasi pegawai	Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja	1 Laporan	B03, B0	Kepala Dinas	Selesai	Telah memberikan Peringatan pada ASN yang tidak disiplin	-	https://drive.google.com/file/d/1iaaql8y6d4K5FmwtXyUx-06xBYu1ujq/view?usp=sharing
2	Penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja : Membuat mekanisme yang jelas melalui penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja agar data yang dikumpulkan dapat diandalkan untuk keperluan pengukuran kinerja	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	1 Laporan	B06	Kepala Dinas	Selesai	Bahan telah disusun	-	https://drive.google.com/file/d/10bTUAitvGhPn727p850ix_O deh2HkVd/view?usp=sharing
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	1 Laporan	B01 - B12	Kepala Dinas	Selesai	Pemantauan capaian kinerja secara fisik dan keuangan	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9OzvU2KgH7FpJ_bCPR70NAQrmo26/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
4	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id	Telah diunggah laporan kinerja dan data pendukung melalui esr.menpan.go.id	1 Aplikasi	B01, B04, B07, B10	Kepala Dinas	Selesai	Telah diupload	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mvn0XCyR-Hs8d7LnB4ego5TOznudYnX/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
C. Pelaporan Kinerja									
1	Mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja.	Telah membuat perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sesuai dg PermenpanRB dan mereviu laporan kinerja instansi pemerintah dalam penyusunan laporan kinerja.	2 laporan	B06	Kepala Dinas	Selesai	Laporan Kinerja telah direviu dan diperbaiki	-	https://drive.google.com/file/d/1SXL-e0v_Sg6-eCXzm3aiKIY1zA1bJ0o/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1s9AQbociD2Wpbt5UP3vf5T0UzqY3Ea46/view?usp=sharing
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal									
1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	3 laporan	B02	Kepala Dinas	Selesai	LHE dan Surat Pernyataan Reviu	-	https://drive.google.com/file/d/1ebhgAmAH3uioag0oJU5ctaEBKWuHW_ACP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_m7rXFCp2K_H1OsYMI9A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 di Kota Padang Panjang mengalami masa transisi dimana RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 diubah menjadi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sehingga berdampak terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 menjadi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 merupakan periode 3 tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 mengalami perubahan pada tahun 2025 menjadi Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dokumen Renstra menjadi acuan bagi Dinas perhubungan Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.



2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN RPD dan RPJMD

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN / SASARAN	RPD 2024-2026	RPJMD 2025-2029
TUJUAN	Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan
SASARAN	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak

Urusan Perhubungan yang dimuat pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 maupun RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak lepas dari peningkatan kualitas infrastruktur sehingga ini menjadi prioritas bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dan Tahun 2025-2029

TUJUAN / SASARAN	Renstra 2024-2026	Renstra 2025-2029
TUJUAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan
SASARAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaraan urusan perhubungan mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya, pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dan Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan adalah peningkatan kualitas infrastruktur Perhubungan. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut.

Pada periode Renstra 2024-2025 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, berkembang pada Renstra 2025-2029 terdapat 2 (dua) sasaran yakni sasaran urusan perhubungan dan sasaran urusan penunjang.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target		
					2024	2025	2026
Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan		Indeks kualitas Infrastruktur Perhubungan	96,76	96,83	96,90
			Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Kota	38,84	38,84	38,84
			Kinerja Lalu Lintas	0,339	0,339	0,339	

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan		Indeks kualitas Infrastruktur Perhubungan	96,83	96,90	97,02	97,09	97,16	97,23
			Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	0,7778	0,7779	0,7780	0,7781	0,7782	0,7783
				Kinerja Lalu Lintas	0,38	0,38	0,374	0,37	0,36	0,36
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,76	73,64	75,52	77,41	79,29	81,17	

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029



2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mendukung program unggulan Kota Padang Panjang, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang juga berperan khusus disektor perhubungan, dimana diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara optimal dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, strategis dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dan RPJMD, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Renstra

Tujuan RPD : Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas				
Sasaran RPD : Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Optimalisasi Penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat	Optimalisasi operasi angkutan kota dan trayek yang dijalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Optimalisasi sarana dan prasarana terminal tipe C	
			Peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum	
			Penataan/penertiban ojek online atau pangkalan	
		Optimalisasi Pendapatan Perpajakan	Optimalisasi pengawasan perpajakan (Perda Parkir)	
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpajakan	
			Penerapan digitalisasi perpajakan	
		Optimalisasi layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat	Optimalisasi pengendalian, pengawasan lalu lintas di jalan raya	
			Penambahan personel bantuan lalu lintas	
			Meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas	
			Meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	
			Penyediaan sarana mobilisasi sarana prasarana dan operasional lalu lintas	
			Masih kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	
			Bimtek SDM PPNS untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan	
			Bimtek SDM Penilaian Andalalin dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Tenaga Teknis Elektro dan IT	
			Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan rehabilitasi, survey dan alat angkut	
		Optimalisasi Pengelolaan PJU	Peningkatan sarana dan prasarana jaringan PJU	
			Kerjasama transformasi PJU (Mercury to LED dan Smart PJU)	

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026



Tujuan RPJMD : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengelolaan gedung parkir Penataan zona parkir tepi jalan Revitalisasi dan penataan Terminal Tipe C Penyediaan dan pengembangan trayek angkutan umum Subsidi operasional angkutan kota Integrasi layanan antar kawasan pendidikan, wisata, dan pasar Pelatihan pengemudi angkutan umum Sertifikasi petugas uji kendaraan (PKB) Edukasi berkala kepada pelajar dan masyarakat 	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Meningkatkan Sistem Lalu Lintas dan Pengendalian Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan rambu dan marka jalan Penerangan jalan umum Kawasan tertib lalu lintas (KTL) Sosialisasi keselamatan berkendara Review dan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) Forum koordinasi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Sinkrisasi data dengan kepolisian, Dishub provinsi, dan penyedia transportasi online Penataan transportasi digital (ojol & angkutan daring) 	
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas Dinas Perhubungan. Mendorong budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan pelaporan kinerja 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Perubahannya.



Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun pertama Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan Wali Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sebelum			No	Sesudah		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	1	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	0.7778
		Kinerja Lalu Lintas	0,45			Kinerja Lalu Lintas Kota (V/C Rasio)	0,38
				2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,76

No	Program	Anggaran	Keterangan	
		Awal	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	8.216.121.440,00	8.322.289.073,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.619.263.820,00	3.414.753.856,00	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan karena di tahun ini terjadi peralihan Pemerintahan Kota Padang Panjang dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Periode 2025-2029, dimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dan implementasi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu "Padang Panjang, Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah", dengan 5 Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang termasuk dalam Misi ke-V yakni "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan



Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan” Visi dan Misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam waktu 5 (lima) tahun dalam Lampiran X Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang didukung anggaran sebesar Rp.11.835.405.260,00 dengan 2 (dua) program, 11 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan, pada bulan April 2025 ada pergeseran DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang disebabkan adanya refocussing anggaran. Pada bulan Agustus 2025 perubahan DPA–SKPD Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perubahan anggaran menjadi Rp.11.737.042.929,00. Pada bulan November terjadi pergeseran dalam rangka penyesuaian anggaran gaji dan belanja pada kegiatan bidang angkutan dan bidang lalu lintas. Pada bulan Desember kembali terjadi pergeseran dalam rangka penyesuaian kekurangan anggaran tunjangan PPh. Berikut tabel penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 :

Tabel 2. 6 Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran	
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	0.7778	Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.414.753.856,00	
		Kinerja Lalu Lintas Kota (V/C Rasio)	0,38	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	2.536.842.036,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	2.449.258.036,00	
					Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	87.584.000,00
					Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.955.200,00
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2.955.200,00
					Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	11.799.000,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	11.799.000,00
					Kegiatan Pengujian Berkala kendaraan bermotor	84.000.000,00
					Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	84.000.000,00
					Kegiatan Pelaksanaan dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kab/Kota	277.780.714,00
					Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	68.459.400,00
					Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	72.971.830,00
					Pengawasan dan Pnendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kab/kota	116.765.984,00
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/kota	19.583.500,00		
			Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota	501.376.906,00		



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
				dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	501.376.906,00
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,76	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.322.289.073,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.282.559.952,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.282.559.952,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.774.551,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.940.580,00
				Penyediaan Bahan logistik kantor	32.163.476,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.177.095,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.493.400,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.523.700,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.523.700,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.463.024.120,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.999.700,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.403.024.420,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	378.406.750,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.790.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.210.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	125.234.850,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.771.300,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.600,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Laporan kinerja tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja Dinas perhubungan Kota Padang Panjang meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Indikator capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dihitung dengan melakukan survey dan pendataan serta evaluasi untuk menghitung indikator kinerja rasio konektivitas kota dan rasio kinerja lalu lintas.



3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (Berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026)

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengukur tingkat capai target kinerja dengan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2025 yaitu :

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Untuk mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota dapat dihitung rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konektivitas Kota} = \frac{(\text{Ik1} \times \text{bobot Angkutan Jalan}) + (\text{Ik2} \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})}{\text{Total Bobot}}$$

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota Padang Panjang x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota Padang Panjang)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota Padang Panjang x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Bobot Trayek atau Lintas :

- a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);



3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Kota Padang Panjang tidak ada angkutan sungai, danau dan penyeberangan sehingga dalam penghitungan rasio konektivitas kota cukup menghitung IK 1 yaitu angkutan jalan.

Tabel 3. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54 (0,6154)	0,7692	124,99%

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Realisasi indikator rasio konektivitas kota sebesar 0,7692, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,6154. Dengan tingkat realisasi capaian 124,99%, menunjukkan bahwa kinerja konektivitas kota telah dapat diupayakan untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah di dalam kota, baik dari sisi infrastruktur maupun aksesibilitas, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas perkotaan secara lebih optimal.

Penghitungan nilai indikator kinerja diatas berdasarkan hasil survey dan data di lapangan dan penghitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, sebagai berikut :

- a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada Kota Padang Panjang x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kota Padang Panjang.

$$\begin{aligned} \text{Hasil Perhitungan IK1} &= \frac{10 \times 1}{13} \\ &= 0,7692 \end{aligned}$$

- b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kota Padang Panjang x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kota Padang Panjang.



Hasil Perhitungan IK2 = = 0

Hasil Perhitungan Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang :

(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

$$= (IK1 \times 100) + (IK2 \times 0)$$

$$= (0,7692 \times 100) + (0 \times 0)$$

$$= 76,92 \text{ atau } 0,7692$$

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan akses jalan dan transportasi darat khususnya angkutan kota, sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang. Serta untuk mendukung akses jalan yang tidak ditempuh oleh angkutan kota, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengoperasikan 2 unit bus sekolah untuk menjemput anak sekolah di 2 (dua) kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor 57.A Tahun 2022 tentang Trayek Bus Sekolah di Kota Padang Panjang.

Berikut layanan trayek angkutan kota yang melayani masyarakat di Kota Padang Panjang.

Tabel 3. 2 Data Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Layanan	Total Trayek	Bobot Trayek	Keterangan
1	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Kab/Kota	10	1	8 trayek Angkot + 2 Bus Sekolah
	b. Antar Kota Antar Kab/Kota	-		
	Jumlah	10		
2	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Dalam Kab/Kota	13	-	13 Trayek Angkutan Kota
	b. Antar Kota Antar Kab/Kota			
	Jumlah	13		

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel diatas terdapat 10 (tujuh) trayek yang terlayani dari 13 (tiga belas) trayek angkutan kota yang ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor 57.A Tahun 2022 tentang trayek yang dilalui bus sekolah mendukung trayek yang tidak dilalui angkutan kota.

Berikut rincian data dukung rasio konektivitas kota Padang Panjang :



Tabel 3. 3 Rincian Data Kebutuhan Trayek

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi
1	01	Pusat Pasar- Jl. Imam Bonjol - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Jl. A. Yani - Batas Kota	Angkutan Kota	
2	02	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Adam BB - Jl. Pemuda - Koto Panjang - Koto Katik - Sago - Simpang Monas	Angkutan Kota	
3	03	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Jl. A. Yani - Jl. Ibrahim Musa - MAN Gunung - Jl. Lingkar Parnansiangan - Jl. Lingkar Kacang Kayu	Angkutan Kota	
4	04	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Simpang Hasiba - Jl. H. Agus Salim (Guguk Malintang) - Jl. Bahder Johan - Kampung Jambak ISI - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Sudirman - M. Syafei - Pusat Pasar	Angkutan Kota	
5	05	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Jl. A. Yani - Ransam - Kubu Gadang - Batu Tagak - Jl. Air Asin	Angkutan Kota	
6	06	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. KH Ahmad Dahlan - Simp. Hasiba Belok kiri - Jl.H. Agus Salim - Simpang Tanjung - Bukit Kandung - Tabek Gadang - RSUD Gantiang	Angkutan Kota	
7	07	Pusat Pasar - Jl. M. Syafei - Jl. Imam Bonjol - Jl. Anas Karim - Gudang Garam - Tanah Hitam - Jl. Bgd Aziz Chan - Jl. Pelita Kubu Cubadak - Depan Kantor Lurah Koto Panjang - Perumnas Perbukitan Teduh (Padang Reno) - Jl. Ahmad Karim	Angkutan Kota	
8	08	Terminal Bukit Surungan - Jl. Hamka - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Sudirman - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Jl. A. Yani - Batas Kota	Angkutan Kota	
9	09	Terminal Bukit Surungan - Jl. Hamka - Jl. Soekarno Hatta - Jl. St. Syahrir - Silaing Bawah.	Angkutan Kota	
10	10	Pusat Pasar - Jl. M. Syafei - Jl. Imam Bonjol - Jl. M. Yamin - Jl. St. Syahrir - Simpang RPH - SMAN 3 - Simpang RPH - Jl. St. Syahrir - Silaing Bawah	Angkutan Kota	
11	11	Pusat Pasar - Jl. M. Syafei - Jl. Imam Bonjol - Jl. M. Yamin - Jl. Soekarno Hatta - Simpang MTSN - Jl. Karim Amarullah - Terminal Bukit Surungan	Angkutan Kota	
12	12	Pusat Pasar - Jl. M.Syafei - Jl. Imam Bonjol - Jl. Anas Karim - Perumahan Guru - Jl. Kartini - Jl. Bagindo Azis Chan - Jl. Pemuda - Jl. Adam BB - Jl. Imam Bonjol - Jl. Sudirman - Jl. M.Syafei - Pusat Pasar	Angkutan Kota	
13	13	Pusat Pasar - Jl. M.Syafei - Jl. Imam Bonjol - Jl. Anas Karim - Kebun Sikolos - Jl. Rasuna Said - Kampung Teleng - MAN 3	Angkutan Kota	

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Tabel diatas merupakan kebutuhan trayek angkutan kota di wilayah Kota Padang Panjang yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2006.

Tabel 3. 4 Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	01	Pusat Pasar- Jl.Imam Bonjol - Jl.Kh. Ahmad Dahlan - Jl.A. Yani - Batas Kota	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
2	02	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Adam BB - Jl. Pemuda - Koto Panjang - Koto Katik - Sago - Simpang Monas	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
3	03	Pusat Pasar - Jl.Imam Bonjol - Jl.Kb. Ahmad Dahlan - Jl.A. Yani - Jl.Ibrahim Musa - MAN Gunung - Jl.Lingkar parnansiangan -Jl.Lingkar Kacang Kayu	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1



No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
4	04	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Simpang Hasiba - Jl. H. Agus Salim (Guguk Malintang) - Jl. Bahder Johan - Kampung Jambak ISI - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Sudirman - M. Syafei - Pusat Pasar	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
5	05	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Jl. A. Yani - Ransam - Kubu Gadang - Batu Tagak - Jl. Air Asin	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
6	06	Pusat Pasar - Jl. Imam Bonjol - Jl. KH Ahmad Dahlan - Simp. Hasiba Belok kiri - Jl. H. Agus Salim - Simpang Tanjung - Bukit Kandung - Tabek Gadang - RSUD Gantiang	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
7	10	Pusat Pasar - Jl.M. Syafei - Jl.Imam Bonjol - Jl.M. Yamin - Jl.St. Syahrir - Simpang RPH - SMAN 3 - Simpang RPH - Jl.St. Syahrir .Silaing Bawah	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
8	11	Pusat Pasar - Jl.M. Syafei - Jl.Imam Bonjol - Jl.M. Yamin - Jl.Soekarno Hatta - Simpang MTSN - Jl.Karim Amarullah - Terminal Bukit Surungan	Angkutan Kota	>5x seminggu	Tinggi	1
9		Simpang Pertamina Silaing Bawah – Simpang Bappeda – SMAN 1 Padang Panjang – SMKN 1 Padang Panjang – SMPN 3 Padang Panjang – SMKN 2 Padang Panjang	Bus Sekolah	>5x seminggu	Tinggi	1
10		SMPN 6 Padang Panjang – SMKN 1 Padang Panjang – SMPN 1 Padang Panjang – Komplek SD Guguk Malintang	Bus Sekolah	>5x seminggu	Tinggi	1
Rata – rata bobot						1

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dari tabel diatas terdapat 8 (delapan) trayek dilalui oleh angkutan kota dan 2 (dua) trayek dilalui oleh bus sekolah mendukung trayek yang tidak dilalui angkutan kota.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Kinerja lalu lintas dilakukan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu sistem transportasi dalam mengatur pergerakan kendaraan dan pengguna jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lalu lintas seperti kecepatan rata-rata, volume kendaraan, tingkat kemacetan, waktu perjalanan serta keselamatan di jalan. Adapun rumus penghitungan kinerja lalu lintas, sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Lalu Lintas Kota} = \frac{V (\text{Volume Kendaraan})}{C (\text{Kapasitas Kendaraan})}$$

$$DS = V/C$$

DS = Derajat Kejenuhan

V = volume lalu lintas (kendaraan per jam)

C = kapasitas jalan (kendaraan per jam).

Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).



Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas	0,45	0,41	108%

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Penghitungan nilai indikator kinerja diatas berdasarkan hasil survey dan data di lapangan dan penghitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Derajat Kejenuhan} &= \text{Volume Lalu Lintas} / \text{Kapasitas Jalan} \\ &= 6,08 / 15 \\ &= 0,41 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan V/C ratio di Kota Padang Panjang sebesar 0,41(B)

Penghitungan indikator ini dengan melakukan pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan utama yang ada diwilayah Kota Padang Panjang, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 6 Data Dukung Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2025

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	FCcs	Volume (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	V/C Ratio	Level of Service
Padang Panjang Barat	1	Sutan Syahrir	4,20	2900	1,14	1	0,94	0,86	1837,36	2672,57	0,69	C
Padang Panjang Barat	2	Daud Rasyidi	0,65	6000	0,91	1	0,94	0,86	862,70	4413,86	0,20	B
Padang Panjang Timur	3	Ahmad Yani	3,47	2900	1,29	1	0,94	0,86	1524,13	3024,22	0,50	C
Padang Panjang Barat	4	Kamarullah	0,80	6000	0,92	1	0,92	0,86	796,00	4367,42	0,18	A
Padang Panjang Barat	5	Prof Hamka	1,30	6000	0,92	1	0,92	0,86	1327,10	4367,42	0,30	B
Padang Panjang Barat	6	M Yamin	0,85	2900	1,14	1	0,92	0,86	1288,84	2615,71	0,49	C
Padang Panjang Barat	7	Imam Bonjol	0,62	2900	0,92	1	0,73	0,86	835,94	1674,97	0,50	C
Padang Panjang Barat	8	Sudirman	0,48	2900	1,08	1	0,94	0,86	1162,26	2531,91	0,46	C
Padang Panjang Barat	9	Soekarno-Hatta	1,60	2900	1,14	1	0,94	0,86	1028,50	2672,57	0,38	B
Padang Panjang Timur	10	KH. A.Dahlan	0,70	2900	1,14	1	0,94	0,86	1549,10	2672,57	0,58	C
Padang Panjang Timur	11	Agussalim	2,06	2900	0,87	1	0,94	0,86	879,26	2039,59	0,43	B
Padang Panjang Barat	12	B Johan	0,99	2900	0,87	1	0,94	0,86	1242,00	2039,59	0,61	C
Padang Panjang Barat	13	Hamid Hakim	0,40	2900	0,87	1	0,94	0,86	571,40	2039,59	0,28	B
Padang Panjang Barat	14	LB Mata Kucing	0,70	2900	1	1	0,94	0,86	364,50	2344,36	0,16	A
Padang Panjang Barat	15	Adam BB	0,45	2900	1	1	0,94	0,86	740,90	2344,36	0,32	B
Jumlah									16009,99	41820,73	6,08	bobot (A-F)
Rata - Rata									1067,33	2788,05	0,41	B

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2025



Nilai rasio volume terhadap kapasitas (V/C ratio) sebesar 0,41 menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas masih berada dalam kondisi cukup baik. Dengan nilai tersebut, tingkat pelayanan jalan termasuk dalam kategori C, yang menandakan arus lalu lintas masih stabil namun kecepatan kendaraan mulai dipengaruhi oleh volume lalu lintas. Pengemudi memiliki keterbatasan dalam memilih kecepatan dan manuver, tetapi secara umum kondisi jalan masih dapat melayani pergerakan kendaraan dengan cukup nyaman tanpa terjadi kemacetan yang berarti.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Dengan membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, pada tabel berikut :

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3. 7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	38,46	84,62	100	61,54	77,77	126,4	61,54	0,7692	124,99

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Capaian Kinerja pada indikator rasio konektivitas kota dari target 61,54 atau 0,6154 terealisasi sebesar 0,7692 atau 124,99%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 77,77 atau 0,7777 maka mengalami penurunan sebesar 1,09%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi dan belum maksimalnya trayek terlayani.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3. 8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas	0,45	0,45	100	0,45	0,39	86,67	0,45	0,41	108,88

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025



Capaian kinerja lalu lintas dari target 0,45 terealisasi sebesar 0,41 atau 108,88% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,39 maka capaian indikator ini menunjukkan penurunan kinerja lalu lintas, meskipun masih berada pada tingkat pelayanan kategori B. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dan menyebabkan peningkatan nilai V/C ratio tersebut antara lain adalah bertambahnya volume kendaraan akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, serta perubahan pola perjalanan masyarakat.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ratio Konektivitas Kota	0,7692	0,3884

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat target akhir Renstra Tahun 2024-2026 lebih rendah dari capaian tahun 2025, rendahnya target perencanaan dikarenakan masih minimnya upaya peningkatan pergerakan angkutan kota pada trayek-trayek yang sudah ditetapkan. Dengan realisasi yang sudah bergerak melebihi target diharapkan dari tahun ketahun layanan trayek angkutan kota di Kota Padang Panjang semakin memadai dan menjangkau kebutuhan masyarakat akan angkutan kota sebagai moda transportasi.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas	0,41	0,339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Realisasi kinerja lalu lintas tahun 2025 dengan ratio 0,41 lebih tinggi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 dengan ratio 0,339. Hal



ini disebabkan oleh perubahan iklim lalu lintas yang dipengaruhi oleh penambahan volume kendaraan, kondisi atau kapasitas jalan di tiap tahunnya.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL ATAU PROPINSI

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Sebagai patokan atau tolak ukur perbandingan indikator kinerja dapat dilihat rasio konektivitas standar nasional dan propinsi, sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Propinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar	
				Nasional	Propinsi
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Kota	0,7692	0,627	0,693

Sumber : Kemenhub RI dan Dinas Perhubungan Prop. Sumatera Barat Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio konektivitas nasional dengan nilai rasio 0,627 mencakup transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, mencerminkan nilai yang cukup baik dalam pemenuhan keterhubungan berbagai daerah dan menyediakan akses kepada warga negara diseluruh wilayahnya yang didukung oleh infrastuktur transportasi, jaringan komunikasi dan akses layanan dasar. Sedangkan rasio konektivitas propinsi dengan rasio 0,693 berada pada nilai yang cukup baik dalam tingkat aksesibilitas antar wilayah yang ada di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan realisasi konektivitas kota Padang Panjang dengan rasio 0,7692 maka penyediaan akses transportasi bagi masyarakat cukup baik dan masih perlu peningkatan layanan sarana dan prasarana terkait angkutan dan akses trayek yang dilayani.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Sebagai patokan atau tolak ukur perbandingan indikator kinerja dapat dilihat rasio kinerja lalu lintas standar nasional dan propinsi, sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Propinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar	
				Nasional	Propinsi
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas	0,41	0,68	0,40

Sumber : Kemenhub RI dan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Tabel diatas menunjukkan kinerja lalu lintas skala nasional dengan rasio 0,68 menunjukkan kondisi lalu lintas mulai padat, tetapi masih dapat bergerak dan lancar, kemacetan terjadi pada jam sibuk. Sedangkan kinerja lalu lintas propinsi Sumatera Barat dengan rasio 0,40 berada pada kondisi lalu lintas masih sangat lancar, jalan memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume lalu lintas yang tanpa kemacetan. Jika dibandingkan dengan kinerja lalu lintas Kota Padang Panjang dengan rasio 0,41 maka jalan di kota kecil ini masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume kendaraan dan tanpa kemacetan.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 masih perlu dilakukan evaluasi dan analisa pada masing-masing indicator tersebut :

Indikator 1, Ratio Konektivitas Kota

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas kota adalah terhubungnya antar wilayah didalam kota, termasuk angkutan perkotaan baik transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara, khusus konektivitas kota Padang Panjang hanya mengakomodir transportasi darat yaitu angkutan kota.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator ratio konektivitas kota antara lain :

1. Trayek angkutan tidak aktif pada sejumlah trayek yang ditentukan sehingga sudah kurang menyentuh kebutuhan masyarakat;
2. Banyak bermunculan alternative angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya.
3. Kondisi fisik kendaraan, seperti umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, ini juga karena tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan.

Solusi :

1. Telah dilakukan pengawasan terminal terhadap operasi angkutan umum.
2. Menghimbau pemilik/pengusaha angkutan untuk mengurus KP dan melakukan KIR secara rutin.



3. Menjalankan program unggulan transportasi gratis bagi pelajar berdampak dapat mengaktifkan kembali trayek angkutan umum yang vakum serta berkerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Kinerja lalu lintas merupakan kemampuan dari suatu jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Kinerja jalan ditentukan oleh kapasitas, derajat kejenuhan ("Degree of Saturation", DS), kecepatan rata-rata, waktu perjalanan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian indicator ratio kinerja lalu lintas antara lain :

1. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Volume Lalu Lintas pada beberapa ruas jalan.
3. Perubahan tata guna lahan dan pusat bisnis.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas lalu lintas.

Solusi :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas serta ketersediaan fasilitas pendukung lainnya yang membuat kinerja lalu lintas semakin baik
2. Menekan kepemilikan kendaraan pribadi dengan berupaya melakukan pengembangan jaringan trayek angkutan umum dengan pelayanan yang baik dengan media angkutan umum masal
3. Adanya upaya peningkatan penegakan aturan secara maksimal.
4. Melakukan penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi beban kapasitas jalan menuju pusat bisnis.

6. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

1.1 Komposisi dan Kualifikasi SDM

- Dinas Perhubungan memiliki 60 ASN, 42 PPPK Paruh Waktu
- Sebaran Golongan ; Mayoritas pegawai berada di Golongan III (58,33%), Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang kepangkatan menengah yang umumnya memiliki pengalaman kerja dan kompetensi yang cukup matang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sementara itu, sisa pegawai tersebar pada golongan lainnya, yang berperan sebagai pelengkap dalam menjaga keseimbangan struktur organisasi serta



mendukung keberlanjutan regenerasi dan pengembangan karier pegawai.

- Tingkat Pendidikan :
 - 21,66% pegawai memiliki gelar D2-D, 35,00% pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), 3,33% memiliki S2.
 - 28,33% pegawai lulusan SLTA, 11,66% lulusan SMP.
- Sertifikasi Kompetensi :
 - 3 pegawai memiliki Kompetensi Penguji
 - 1 pegawai memiliki Kompetensi PPNS
 - 3 pegawai memiliki Kompetensi Penilaian Andalalin
 - 2 pegawai memiliki Sertifikasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - 4 pegawai memiliki Sertifikasi Orientasi Lalu Lintas
 - 4 pegawai memiliki Sertifikasi Diklat Traffict Light

1.2 Efisiensi dan Permasalahan SDM

Keunggulan :

- Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas dalam bidang teknis.
- Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.

Kelemahan :

- Keterbatasan jumlah personil operasional lapangan dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, dengan hanya 13 ASN dan 9 orang PPPK Paruh Waktu.
- Keterbatasan tenaga teknis penerangan lampu jalan, dengan 1 orang PPPK, 4 orang PPPK Paruh Waktu.
- Keterbatasan tenaga penguji kendaraan bermotor, dengan hanya 3 orang ASN, 1 pegawai penguji TK 3 dan 2 orang penguji TK 2, sementara Penguji TK 5 sangat dibutuhkan mengingat UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang banyak menguji kendaraan roda 6.
- Keterbatasan tenaga yang berkompetensi dapat menurunkan kualitas pelayanan urusan perhubungan di Kota Padang Panjang.
- Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi berdampak pada kapabilitas ASN Dinas Perhubungan dalam penyelesaian masalah dan meningkatkan inovasi terkait sistem transportasi dan kebijakan perhubungan.

1.3 Rekomendasi untuk meningkatkan Efisiensi SDM

Strategi Perbaikan :

- Meningkatkan jumlah pegawai berkompetensi, terutama dalam bidang PPNS, Penguji dan Penilai Andalalin, Manajemen Angkutan
- Mendorong pelatihan berkelanjutan melalui program Bimtek dan Diklat yang dilaksanakan Lembaga Kementerian atau pun Pemerintah Daerah.

2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

2.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran

- Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 11.737.042.929,00 dan 93,95% telah terealisasi, terdiri dari :
 - Rp. 8.094.937.010 (92,27%) untuk Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah
 - Rp. 2.932.157.183 (85,87%) untuk Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2 Efisiensi dan Permasalahan Anggaran

Keunggulan :

- Realisasi anggaran mencapai 93,95%, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan dana.
- Kegiatan prioritas berjalan sesuai dengan rencana.

Kelemahan :

- Porsi anggaran untuk layanan publik dan peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas masih rendah.
- Minimnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM bidang perhubungan.

2.3 Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Strategi Perbaikan :

- Mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur perhubungan
- Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN
- Optimalisasi efisiensi belanja operasional



3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

3.1 Kondisi Sarana dan Prasarana

- Beberapa fasilitas pendukung belum optimal, terutama perangkat elektronik seperti laptop, printer, dan peralatan kerja lainnya.
- Masih kurangnya perlengkapan kantor seperti kursi dan meja
- Belum ada anggaran yang dialokasi untuk pengadaan kendaraan dinas
- Anggaran pemeliharaan gedung kantor yang masih minim yang menunjukkan keterbatasan dalam perencanaan kebutuhan fasilitas kerja

3.2 Efisiensi dan Permasalahan Sarana Prasarana

Keunggulan :

- Pemeliharaan aset daerah berjalan dengan baik, dengan realisasi anggaran 82,44%.
- Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, meskipun ada beberapa keterbatasan.

Kelemahan :

- Kurangnya sarana mobilisasi lapangan baik roda 4 dan roda 2 yang representatif.
- Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional.
- Kurangnya fasilitas pendukung, seperti sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor.

3.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Sarana dan Prasarana

Strategi Perbaikan:

- Mengusulkan pengadaan peralatan kantor
- Mengalokasikan dana pemeliharaan gedung dan peralatan mesin.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU MENJADI PENYEBAB KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran adalah menentukan target kinerja dan anggaran yang dituangkan dan Dokumen Anggaran dan Perjanjian Kinerja. Melakukan evaluasi kerja agar dapat meninjau sejauh mana kegiatan berjalan dan serapan dana yang telah digunakan serta mengetahui kendala atau permasalahan dalam pencapaian kinerja.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan 1 (satu) sasaran strategis dan didukung oleh 1 (satu) program dengan 6 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.



**Tabel 3. 13 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE C	
3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
KEGIATAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota
KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	
5.	Penyediaan Bukti Lulus uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	
7.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota
8.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
9.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
10.	Forum lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota
KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	
11.	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Untuk mendukung indikator perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka program prioritas Dinas Perhubungan yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Hasil Kegiatan

PROGRAM	HASIL KEGIATAN
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Pemasangan 9 titik, tersebar 5 titik di perumahan belakang kantor DPRD, 4 titik gang di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Tanah Pak Lambiak. Pemasangan lampu 2 buah di Kelurahan Pasar Usang gang samping PT Serambi Mekah Umrah, pemasangan 1 unit tiang penyangga di Kelurahan Tanah Pak Lambiak. Pemasangan lampu dan tiang 3 titik di Kelurahan Balai-Balai Jl. St. Mansyur, 1 titik di depan taman kampung manggis, 1 titik di gang belakang Dinas Perdakop Kelurahan Silaing Bawah.
	2. Pemasangan Marka Lalu Lintas pada lokasi Jalan ke Islamic Centre, rest area depan kantor Dinas Perhubungan.
	3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas, Juara 2 Tingkat Propinsi Sumatera Barat diperoleh oleh siswa SMKN 2 Padang Panjang.
	4. Layanan transportasi gratis mendukung penanganan dampak inflasi dan hilirisasi sehingga sangat membantu bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Data pelajar yang menggunakan angkutan gratis sebanyak 1.718 orang Beroperasinya 44 unit kendaraan angkutan kota pada triwulan II dan III dan 30 unit pada triwulan 4.
	5. Fasilitasi angkutan mudik bagi mahasiswa/i yang kuliah di Jabodetabek ke Padang Panjang
	6. Forum Lalu Lintas dengan stakeholder terkait
	7. Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor dan upgrade aplikasi SIM PKB

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

DOKUMENTASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

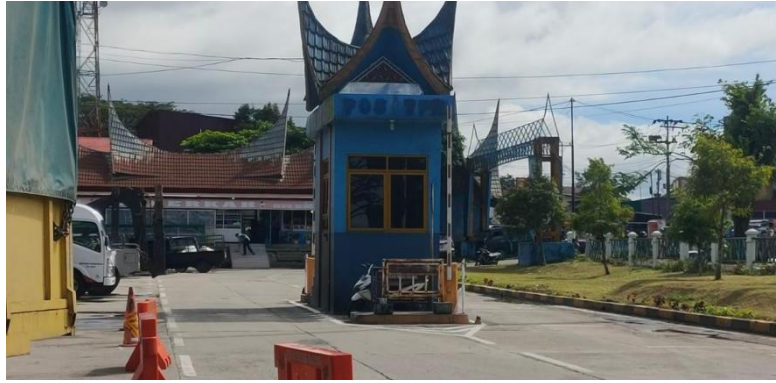
Pemasangan Penerangan Jalan Umum



Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum



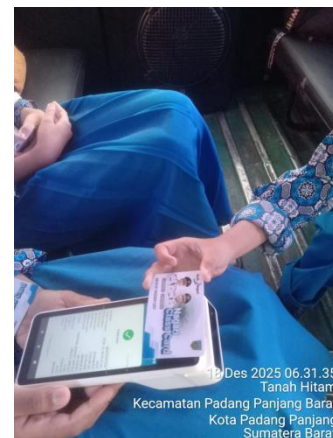
Pemasangan Marka Jalan



Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas



Transportasi Gratis bagi Pelajar



Penjemputan Mahasiswa Mudik



Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Uji



3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (Berdasarkan RPJMD/Renstra 2025-2029)

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengukur tingkat capai target kinerja dengan 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2025 yaitu :

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	0,7778	0,7692	98,89%

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Realisasi indikator rasio konektivitas kota tahun 2025 sebesar 0,7692 dari target sebesar 0,7778 dengan capaian 98,89% mencerminkan kinerja indikator ini tergolong sangat baik meskipun target belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan upaya peningkatan lanjutan untuk capaian yang maksimal.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kinerja Lalu Lintas Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Kinerja Lalu Lintas	0,38	0,41	92,11%

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja lalu lintas tahun 2025 sebesar 0,41 dari target sebesar 0,38 atau 92,11% menunjukkan nilai rasio volume terhadap kapasitas (V/C ratio) masih berada dalam kondisi cukup baik. Dengan nilai tersebut, tingkat pelayanan jalan termasuk dalam kategori B, yang menandakan arus lalu lintas masih stabil namun kecepatan kendaraan mulai dipengaruhi oleh volume lalu lintas. Pengemudi memiliki keterbatasan dalam memilih kecepatan dan manuver, tetapi secara umum kondisi jalan masih dapat melayani pergerakan kendaraan dengan cukup nyaman tanpa terjadi kemacetan yang berarti.

Indikator 3, Nilai AKIP Dinas Perhubungan

Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,76	70,80	98,66

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025



Realisasi indikator kinerja nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar 70,80 atau 98,66% dari target sebesar 71,76 dengan prediket BB menunjukkan tingkat kinerja Sangat Baik.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Dengan membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, pada tabel berikut :

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3. 18 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	38,46	84,62	100	61,54	77,77	126,4	0,7778	0,7692	98,89

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Capaian Kinerja pada indikator rasio konektivitas kota dari target 0,7778 terealisasi sebesar 0,7692 atau 98,89%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 77,77 atau 0,7777 maka mengalami penurunan sebesar 1,09%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, belum maksimalnya trayek terlayani. Penurunan capaian rasio konektivitas kota sebesar 1,09% dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Secara teknis, masih terdapat ruas jalan yang belum optimal mendukung keterhubungan antarwilayah kota serta keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, faktor non-teknis seperti keterbatasan ketersediaan lahan, kompleksitas koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian terhadap regulasi dan perencanaan wilayah turut memengaruhi kecepatan peningkatan konektivitas kota pada periode pelaporan.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3. 19 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Kinerja Lalu Lintas	0,45	0,45	100	0,45	0,39	86,67	0,38	0,41	92,11

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025



Capaian kinerja lalu lintas dari target 0,38 terealisasi sebesar 0,41 atau 92,11% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,39 maka capaian indikator kinerja lalu lintas masih dalam tingkatan yang baik, karena rasio kinerja lalu lintas memiliki trend menurun, semakin kecil angka rasio semakin bagus kinerja lalu lintas, hal ini didukung oleh volume kendaraan yang tidak terlalu padat diruas jalan utama. Secara umum kondisi jalan masih dapat melayani pergerakan kendaraan dengan cukup nyaman tanpa terjadi kemacetan yang berarti.

Indikator 3, Nilai AKIP Dinas Perhubungan

Tabel 3. 20 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024	2025		
			Real	Real	Target	Real	%
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,76	70,70	71,76	70,80	98,66

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 sebesar 98,66%, dengan realisasi sebesar 70,80 dari target sebesar 71,76. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 70,70 maka nilai AKIP Dinas Perhubungan mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Hal ini didukung oleh upaya perbaikan dan penyempurnaan komponen dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Indikator 1, Rasio Konektivitas Kota

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2030
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Ratio Konektivitas Kota	0,7692	0,7783

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat target akhir Renstra lebih tinggi dari capaian tahun 2025, hal ini diharapkan ada peningkatan dari tahun ketahun terhadap layanan trayek angkutan kota di Kota Padang Panjang sehingga kebutuhan



masyarakat akan angkutan kota sebagai moda transportasi dapat terpenuhi dan memadai.

Indikator 2, Kinerja Lalu Lintas

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2030
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Kinerja Lalu Lintas Kota (V/C Rasio)	0,41	0,36

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kinerja lalu lintas merupakan indikator kinerja yang nilainya capaiannya semakin rendah menunjukkan kinerja lebih baik sehingga target akhir Renstra terlihat lebih rendah dari capaian tahun 2025, hal ini diharapkan lalu lintas di Kota Padang Panjang tetap stabil dan bebas dari macet meski pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya bertambah. Upaya lanjutan dan berkelanjutan dalam pengelolaan lalu lintas, peningkatan kapasitas prasarana, serta penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar pada akhir periode perencanaan nilai V/C Rasio dapat diturunkan dan mencapai target Renstra 2030.

Indikator 3, Nilai AKIP Dinas Perhubungan

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2030
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	70,80	81,17

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Target akhir Renstra indikator kinerja nilai AKIP Dinas Perhubungan sebesar 81,17 menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi target yang telah direncanakan pada akhir periode Renstra. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan manajemen kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta optimalisasi evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan nilai AKIP Dinas Perhubungan secara berkelanjutan hingga tahun 2030.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.737.042.929,00 yang dijabarkan dalam 2 program dan 11 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan terealisasi sebesar Rp11.027.094.193 atau 93,95%

Sedangkan dari 2 program dengan 11 Kegiatan yang berhubungan langsung dengan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok 1 Program urusan perhubungan memiliki 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp3.414.753.856,00 atau 29,09% dari total anggaran, dan terealisasi sebesar Rp2.932.157.183,00 atau 85,87% dari target anggaran.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan perhubungan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas serta informasi pada masyarakat Kota Padang Panjang.

Realisasi keuangan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 24 Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.322.289.073,00	8.322.289.073,00	8.094.937.010,00	97,27
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6.282.559.952,00	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	98,37
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.282.559.952,00	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	98,37
2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	190.774.551,00	190.774.551,00	177.818.208,00	93,21
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.940.580,00	5.940.580,00	5.777.000,00	97,25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.163.476,00	32.163.476,00	28.561.000,00	88,80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.177.095,00	40.177.095,00	31.223.500,00	77,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.493.400,00	112.493.400,00	112.256.708,00	99,79
3	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	7.523.700,00	7.523.700,00	7.199.999,00	95,70
	Pengadaan Pealatan dan Mesin Lainnya	7.523.700,00	7.523.700,00	7.199.999,00	95,70
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.463.024.120,00	1.463.024.120,00	1.417.312.342,00	96,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.999.700,00	59.999.700,00	50.558.521,00	84,26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.403.024.420,00	1.403.024.420,00	1.366.753.821,00	97,41



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	378.406.750,00	378.406.750,00	311.958.230,00	82,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.790.000,00	86.790.000,00	59.541.550,00	68,60
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.210.000,00	125.210.000,00	118.797.330,00	94,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	125.234.850,00	125.234.850,00	100.117.350,00	79,94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	28.771.300,00	28.771.300,00	22.897.000,00	79,58
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.600,00	12.400.600,00	10.605.000,00	85,52
II	Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.414.753.856,00	3.414.753.856,00	2.932.157.183,00	85,87
6	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	2.536.842.036,00	2.536.842.036,00	2.451.180.348	96,62
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	2.449.258.036,00	2.449.258.036,00	2.374.387.169,00	96,94
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	87.584.000,00	87.584.000,00	76.793.179,00	87,68
7	<i>Pengelolaan Terminal Tipe C</i>	2.955.200,00	2.955.200,00	1.417.500,00	47,96
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2.955.200,00	2.955.200,00	1.417.500,00	47,96
8	<i>Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	11.799.000,00	11.799.000,00	2.310.000,00	19,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota	11.799.000,00	11.799.000,00	2.310.000,00	19,57
9	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	84.000.000,00	84.000.000,00	83.210.000,00	99,06
	Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	84.000.000,00	83.210.000,00	99,06
10	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	277.780.714,00	277.780.714,00	264.186.335	95,11
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	68.459.400,00	68.459.400,00	63.221.850,00	92,35
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	72.971.830,00	72.971.830,00	71.510.085,00	97,99
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota	116.765.984,00	116.765.984,00	111.154.400,00	95,19
	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	19.583.500,00	19.583.500,00	18.300.000,00	93,45



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase
11	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	286.836.700,00	286.836.700,00	281.156.872,00	25,89
	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan anngkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) kabupaten/kota	501.376.906,00	501.376.906,00	129.853.000,00	25,89

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 sebesar Rp. 11.737.042.929,00 tidak ada perubahan dengan anggaran pada LRA Tahun 2025 meski pada bulan November dan Desember terdapat pergeseran anggaran namun tidak mempengaruhi total anggaran secara keseluruhan.

Anggaran tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 11.027.094.193,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 12.025.092.411,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 997.995.218 atau 8,30%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 25 Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	%
2024	12.218.461.373,00	12.025.092.411,00	98,42
2025	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	93,95

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Padang Panjang secara optimal melalui pelayanan transportasi. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia dan mendukung kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebesar Rp11.737.042.929,00 terealisasi sebesar Rp11.027.094.193,00 atau 93,95% dengan sisa anggaran sebesar Rp709.948.736,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 6,05%.
2. Sasaran Strategis kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026 yang didukung oleh 1 Program, 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
3. Sasaran Strategis kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029 yang didukung oleh 2 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun pertama Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
4. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 dengan indikator kinerja rasio konektivitas kota dengan target sebesar 61,54 terealisasi sebesar 76,92 atau 125,17%. Indikator rasio kinerja lalu lintas dengan target sebesar 0,45 dan terealisasi sebesar 0,41 atau 108%.
5. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja rasio konektivitas kota dengan target sebesar 0,7778 terealisasi sebesar 0,7692 atau 98,89%. Indikator rasio kinerja lalu lintas dengan target sebesar 0,38 dan terealisasi sebesar 0,41 atau 92,11%. Indikator kinerja nilai AKIP Dinas Perhubungan dengan target sebesar 71,76 terealisasi sebesar 70,80 atau 98,66%.



4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan ditemui beberapa permasalahan dan kendala pada indikator-indikator yang menjadi target kinerja, diantaranya :

1. Beberapa trayek angkutan tidak aktif atau tidak dilalui angkutan sehingga kurang menyentuh kebutuhan masyarakat;
2. Banyak bermunculan alternative angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya.
3. Kondisi fisik kendaraan, seperti umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, ini juga karena tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan pemeliharaan.
4. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup tinggi.
5. Peningkatan Volume Lalu Lintas pada beberapa ruas jalan.
6. Perubahan tata guna lahan dan pusat bisnis.
7. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas lalu lintas.
8. Belum sempurnanya sinkronisasi pada perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

4.3 SARAN/ REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 diperoleh atas kerjasama dan dukungan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan baik pelayanan lalu lintas dan angkutan, penyediaan sarana dan prasarana demi mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kota Padang Panjang.

Upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan layanan angkutan kota dan optimalisasi jalur trayek angkutan kota.
2. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan agar terwujudnya kinerja perangkat daerah yang akuntabilitas.

Padang Panjang, 20 Februari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG


FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP.19850609 200412 1 002



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. Dr. Hamka No. 87 Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang 27115
Email : dishub.padangpanjang@gmail.com website : [portalpadangpanjang](http://portalpadangpanjang.com)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRI ARNIS**
Jabatan : Wali Kota Padang Panjang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Wali Kota Padang Panjang



HENDRI ARNIS



Padang Panjang,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG**


SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	1	Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	0,7778
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0,45			Kinerja Lalu Lintas Kota	0,38
				2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,76

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.216.121.440	8.322.289.073	
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.619.283.820	3.414.753.856	
	Jumlah	11.835.405.260,00	11.737.042.929,00	

Padang Panjang

2025



WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP. 198506092004121002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA PUTRA,S.ST,MT
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : HENDRA PUTRA,S.ST,MT
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 September 2025

**PIHAK KEDUA
PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**


**HENDRA PUTRA,S.ST,MT
NIP. 197001007 199003 1 003**

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**


**HENDRA PUTRA,S.ST,MT
NIP. 197001007 199003 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KKab/Kota	Persentase Pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%
	1) Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%
	2) Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%
	3) Meningkatnya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	4) Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%
	5) Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selesai dilaksanakan	100%	100%

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
1)	Administrasi keuangan perangkat daerah	5.777.449.609	6.282.559.952	
2)	Administrasi umum perangkat daerah	282.966.051	190.774.551	
3)	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah	112.211.860	7.523.700	
4)	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.624.436.520	1.463.024.120	
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	419.057.400	378.406.750	

Padang Panjang, 01 September 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang

Pihak Pertama,
Sekretaris
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Handra Putra, S. ST.M.T
MIP. 19651112 198602 1 002

Handra Putra, S. ST.M.T
MIP. 197001007 199003 1 003



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. ALBER DWITRA,MM

Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA PUTRA,S.ST,MT

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 Setember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

HENDRA PUTRA,S.ST,MT
NIP. 197001007 199003 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP. 19680905 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase layanan angkutan darat	87,20%	87,20%
	1) Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe c	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	1 unit
	2) Meningkatnya Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 titik	16 titik
	3) Meningkatnya Penyediaan Jasa Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dala 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 angka	1215 angka

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1)	Pengetolaan Terminal Penumpang Tipe c	38.407.700	2.955.200	
2)	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	17.410.000	11.799.000	
3)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dala 1 (satu) kabupaten/kota	154.504.000	501.376.906	

Pihak Kedua,
Ptt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang

HENDRA PUTRA, S. ST.M.T
NIP. 197001007 199003 1 003

Padang Panjang, 01 September 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Drs. M. Alber Dwitra, MM
NIP. 19680905 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RULLY HARDIAN,S.STP,M.PA
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA PUTRA,S.ST,MT
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 Setember 2025

**PIHAK KEDUA
PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

**HENDRA PUTRA,S.ST,MT
NIP. 197001007 199003 1 003**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN
AKREDITASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

**RULLY HARDIAN, S.STP,M.PA
NIP. 19820919 200012 1 001**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG LALU LINTAS & AKREDITASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50%	69.50%
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.003681 angka	0.003681 angka
	1) Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.40	84.40
	2) Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	4 kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten Kota	2.846.473.120	2.536.842.036	
2)	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / kota	453.469.000	277.780.714	

Pihak Kedua,
 PTL Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Padang Panjang


 HENDRA PUTRA, S. ST.M.T
 NIP. 197001007 199003 1 003

Padang Panjang, 01 September 2025
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


 Rully Hardian, SS.TP.M.PA
 NIP.19820119 200012 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDHIKA PURNAMA BAYU, S.SiT
Jabatan : KEPALA SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN,
PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RULLY HARDIAN, SSTP.M.PA
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 Setember 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN
AKREDITASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG


RULLY HARDIAN, S.STP,M.PA
NIP. 19820919 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN,
PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN
OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG


ANDHIKA PURNAMA BAYU, S.SiT
NIP. 19790120 200604 1 011


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN, PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor		
1)	Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4 kegiatan	4 kegiatan
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	12 laporan	12 laporan

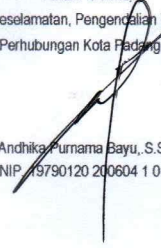
	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1)	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota			
1)	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	72.644.000	116.765.984	

Padang Panjang, 01 September 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


 Rully Hurdian, SS/TP.M.PA
 NIP.198201192000121001

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


 Andhika Purnama Bayu, S.SIT
 NIP.197901202006041011



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IFDAL, S.SiT
Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RULLY HARDIAN, SSTP.M.PA
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 Setember 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN
AKREDITASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG


RULLY HARDIAN, S.STP,M.PA
NIP. 19820919 200012 1 001

PIHAK PERTAMA
KASI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG


IFDAL, S.SiT
NIP. 197906072006041009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan			
	1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
	(1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	2 unit
	2) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
	(1) Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	1 laporan
	(2) Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan	2 dokumen	2 dokumen
	(3) Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	12 laporan

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			
	1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
	(1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan	125.000.000	87.584.000	
	2) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
	(1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.630.000	19.583.500	
	(2) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	255.340.000	72.971.830	
	(3) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	94.855.000	68.459.400	

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Rully Hardian, SS, P, MPA
 NIP. 198209192001121001

Padang Panjang, 01 September 2025
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Idal, S. S.
 NIP. 197906072003041009



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRY FIRMAN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA PUTRA,S.ST,MT

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 September 2025

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**


**HENDRA PUTRA,S.ST,MT
NIP. 197001007 199003 1 003**

**PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**


**HENDRY FIRMAN, SE
NIP. 19721123 200604 1 005**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota			
	1) Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	728 orang/Bulan	728 orang/Bulan
	(1) Terlaksananya Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 orang/Bulan	728 orang/Bulan
	2) Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	1 dokumen	1 dokumen
	(1) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket
	(2) Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket
	(3) Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2 paket
	(4) Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
	3) Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	(1) Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	0 unit
	4) Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%
	(1) Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	(2) Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
	5) Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang	100%	100%
	(1) Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	8 Unit
	(2) Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	4 unit
	(3) Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	2 unit
	(4) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	8 unit
	(5) Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota			
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	(1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.777.449.609	6.282.559.952	
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	(1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	5.940.580	
	(2) Penyediaan bahan logistik kantor	45.401.500	32.163.476	
	(3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.899.850	40.177.095	
	(4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	201.664.701	112.493.400	
	3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			
	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.211.860	7.523.700	
	4) Jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
	(1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60.000.000	59.999.700	
	(2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.564.436.520	1.403.024.420	
	5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah			
	(1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	80.000.000	86.790.000	
	(2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	150.500.000	125.210.000	
	(3) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perizinan alat besar	149.992.000	125.234.850	
	(4) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.565.400	28.771.300	
	(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	30.000.000	12.400.600	

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang


Hendra Putra, S. ST.MT
NIP. 19840402 200212 1 005

Padang Panjang, 01 September 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


Hendry Firman, SE
NIP. 19721123 200604 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOSES YUNGH HHS, S.Kom
Jabatan : KASI PENDATAAN DAN PENGENDALIAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. M. ALBER DWITRA, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
PERPARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP. 19680905 198809 1 001

PIHAK PERTAMA
KASI PENDATAAN DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

MOSES YUNGH HHS, S.Kom
NIP. 19800518 201001 1006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	1) Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	1 unit
	(1) Terlaksananya Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 dokumen	1 dokumen

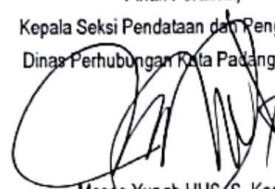
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
	1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	38.407.700	2.955.200	

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang



Drs. M. Alber Dwitra, MM
NIP. 19680905 198809 1 001

Padang Panjang, 01 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pendataan dan Pengendalian
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang



Moses Yungh HHS/S. Kom
NIP. 19800518 2010001 1 006



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOVIS HENDRY MACHDONAL, S.Sos

Jabatan : KASI ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. M. ALBER DWITRA, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 September 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
PERPARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP. 19680905 198809 1 001

**PIHAK PERTAMA
KASI ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**


KOVIS HENDRY MACHDONAL, S.Sos
NIP. 19730303 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG


NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	1) Terlaksananya Penebitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 titik	16 titik
	(1) Terlaksananya Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
	1) Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	17.410.000	11.799.000	

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


Drs. M. Alber Dwitra, MM
NIP. 19680905 198809 1 001

Padang Panjang, 01 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Angkutan
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


Kovis Hendry Machdonal, S.Sos
Nip. 19730303 200604 1 016



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: disnub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI, ST

Jabatan : KEPALA UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA PUTRA,S.ST,MT

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 September 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

HENDRA PUTRA,S.ST,MT
NIP. 197001007 199003 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG


DONI, ST
NIP. 19740220 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

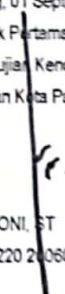
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	1) Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala		
	(1) Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	0 Dokumen
	(2) Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	9 unit

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
	(1) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.020.000	0	
	(2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.000.000	84.000.000	

Pihak Kedua,
Pit. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang


HENDRA PUTRA, S. ST.M.T
NIP. 197001007 199003 1 003

Padang Panjang, 01 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


DONI, ST
NIP. 19740220 200604 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Prof. DR. HAMKA NO. 87 Tel (0752) 82051 PADANG PANJANG 27115
Email: dishub.padangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENI AMELIA, SH
Jabatan : KTU UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : DONI, ST
Jabatan : KEPALA UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 September 2025

**PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD PKB DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

**DONI, ST
NIP. 19740220 200604 1 002**

**PIHAK PERTAMA
KTU UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

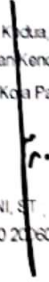

**YENI AMELIA, SH
NIP. 19790605 200701 2 004**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA TATA USAHA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	1) Meningkatkan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan terlayani Uji Keur		
	(1) Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	0 Dokumen
	(2) Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	9 unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
	Sebelum	Sesudah	
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
(1) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25 020 000	0	
(2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84 000 000	84 000 000	

Pihak Kedua,
 Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


 DONI ST
 NIP. 19740220 200604 1 002

Padang Panjang, 01 September 2025
 Pihak Pertama,
 KTU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang


 YENI ANZALIA, SH
 NIP. 19790605 200701 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp. (0752) 82051 Padang Panjang 27115
Email : dishub.padangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Lembar Kedua : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Lembar Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG



ARKES REFAGUS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang;
5. Arsip.

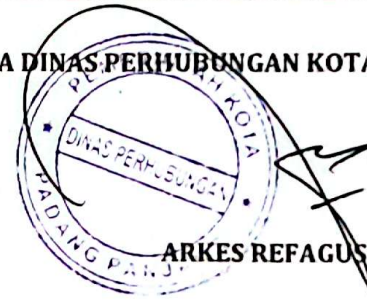
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Padang Panjang
 Nomor : 700/07/DISHUB-PP/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR UTAMA KINERJA (IKU)
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Rasio Konektivitas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota ✓ Belum optimalnya layanan pada trayek yang telah ditetapkan 	Perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan terhadap jumlah total kawasan perkotaan yang telah ditetapkan	$IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan} + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan})$ $IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = (\text{Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek}) \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan trayek})$ $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas} \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan})$ Bobot Trayek atau lintas : <ul style="list-style-type: none"> a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3x dalam seminggu), bobot=0.5 	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi ✓ Belum optimal perlengkapan lalu lintas ✓ Belum optimal sinkronisasi dengan stakeholder terkait 	Perbandingan volume lalu lintas kendaraan terhadap kapasitas jalan kendaraan	$DS = V/C$ DS = Derajat Kejenuhan V = volume lalu lintas (kendaraan per jam) C = kapasitas jalan (kendaraan per jam). Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. Dr. Hamka No. 87 Padang Panjang 27115

Email : dishub.padangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/ 066/DISHUB-PP/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Lembar Kedua : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 066 /DISHUB-PP/2025
Tanggal : 06 Oktober 2025

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

Lembar Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 266 /DISHUB-PP/2025
Tanggal : 06 Oktober 2025

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 266 /DISHUB-PP/2025
Tanggal : 06 Februari 2025

**INDIKATOR UTAMA KINERJA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	- Rasio Konektivitas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota ✓ Belum optimalnya layanan pada trayek yang telah ditetapkan 	Mengukur tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota	IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek) dibagi (Jumlah kebutuhan trayek) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan) Bobot Trayek atau lintas : a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3x dalam seminggu), bobot=0,5	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

	- Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi ✓ Belum optimal perlengkapan lalu lintas ✓ Belum optimal sinkronisasi dengan stakeholder terkait 	Tingkat kelancaran arus lalu lintas di jalan perkotaan.	$DS = V/C$ $DS = \text{Derajat Kejenuhan}$ $V = \text{volume lalu lintas (kendaraan per jam)}$ $C = \text{kapasitas jalan (kendaraan per jam)}$ Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	
2.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Hasil AKIP OPD	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja ✓ Keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang belum optimal ✓ Lemahnya budaya kinerja di lingkungan organisasi 	Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	Skor evaluasi dari Inspektorat (A, BB, B, CC, C, D).	Perhubungan	Inspektorat Kota Padang Panjang

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN IV			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN IV						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN IV			ANGGARAN TRIWULAN IV			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	TARGET			REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN					
1. Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	1. Rasio Konektivitas Kota	rasio	0,778	0,7692	98,89	Pengumpulan data jumlah trayek angkutan kota yang dilayani	0,778	0,7692	98,89	Pendukung : 1. Pembangunan Infrastruktur 2. Ketersediaan Moda Transportasi 3. Perencanaan Tata Ruang dan Kota yang Baik 4. Manajemen dan Pengawasan Trayek Penghambat : 1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 2. Kepadatan dan Kemacetan Lalu Lintas 3. Kondisi Geografis dan Lingkungan 4. Keterbatasan Anggaran 5. Menurunnya Minat Penumpang Terhadap Angkutan Kota 6. Kurangnya Integrasi Antar Moda													
	2 Kinerja Lalu Lintas Kota	rasio	0,38	0,41	92,11	Survey Traffic Counting	0,38	0,41	92,11	Pendukung : 1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Baik 2. Infrastruktur Jalan yang Terawat Penghambat : 1. Kapasitas Jalan Tinggi 2. Volume Lalu Lintas Tinggi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	86,63	87,68	101,21	3.414.753.856	2.932.157.183	85,87					
												Konektivitas Darat	1	1	100								
												Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2228	3199	143,58	2.536.842.036	2.451.180.348	96,62	Bidang Lalu Lintas			
												Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.600	2787	174,19	2.449.258.036	2.374.387.169	96,94				
												Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2	2	100	87.584.000	76.793.179	87,68				
												Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe c	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1	1	100	2.955.200	1.417.500		Bidang Angkutan			
												Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang	1	1	100	2.955.200	1.417.500	47,97				
												Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Jumlah Lokasi Parkir tepi	14	14	100	11.799.000	2.310.000	19,58	Bidang Angkutan			
												Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	100	11.799.000	2.310.000	19,58				
												Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang terlayani melaksanakan pengujian kendaraan	97,00	98	101,0309	84.000.000	83.210.000	99,06	Bidang Lalu Lintas			
												Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.000	0	0	0	-	-				

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL
OPD TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
A. Perencanaan Kinerja									
	1 Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Telah diperbaiki penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional	1 Dokumen	B05	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah diperbaiki	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7Nk2YwTEI3BSFviha7IDDycR-sOXdzw/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
	2 Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi dan diuraikan dalam dokumen laporan pengukuran kinerja eselon II, III, IV	Telah dilakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi	1 Dokumen	B01, B04, B07, B10, B11	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah tersusun	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xMpg-hXZj5YOpFFyBIZL00HIXSiug/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
B Pengukuran Kinerja									
	1 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja	1 Laporan	B03, B0	Kepala Dinas	Selesai	Telah memberikan Peringatan pada ASN yang tidak disiplin	-	https://drive.google.com/file/d/1iaqul8y6d4K5FmwtXvUx-06xByu1uJa/view?usp=sharing
	2 Penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja : Membuat mekanisme yang jelas melalui penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja agar data yang dikumpulkan dapat diandalkan untuk keperluan pengukuran kinerja	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	1 Laporan	B06	Kepala Dinas	Selesai	Bahan telah disusun	-	https://drive.google.com/file/d/10bTUAtvnGhPn727p8s0lx_O_deh2HkVD/view?usp=sharing
	3 Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	1 Laporan	B01 - B12	Kepala Dinas	Selesai	Pemantauan capaian kinerja secara fisik dan keuangan	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9Ozvu2KgH7FpJp_bCPR70rNAjOrmoZ6/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
	4 Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id	Telah diunggah laporan kinerja dan data pendukung melalui esr.menpan.go.id	1 Aplikasi	B01, B04, B07, B10	Kepala Dinas	Selesai	Telah diupload	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mvn0XCyr-Hs-8d7LnB4ego5TOznuDYNx/edit?usp=sharing&oid=109311254948514158080&rtpof=true&sd=true
C Pelaporan Kinerja									
	1 Mepedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja.	Telah membuat perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sesuai dg PermenpanRB dan mereviu laporan kinerja instansi pemerintah dalam penyusunan laporan	2 laporan	B06	Kepala Dinas	Selesai	Laporan Kinerja telah direviu dan diperbaiki	-	https://drive.google.com/file/d/1SFXl-eQw_Sg6-eCXzm3aikIY1zA1bJ0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1s9AQbocID2Wpbt5UP3vf5T0UzgY3Ea46/view?usp=sharing
D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal									
	1 Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	3 laporan	B02	Kepala Dinas	Selesai	LHE dan Surat Pernyataan Reviu	-	https://drive.google.com/file/d/1ebhgmAH3uioog0J5ctaEBKWuWuW_ACP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1m7_rXfCp2K_H10sYMI9A

Padang Panjang, 11 Juni 2025



PADANG P
NIP: 19651112 198602 1 001